REUSE APLIKASI SI~MANTAN SEBAGAI SARANA PELAPORAN DTU PEMDA

"SI~MANTAN" akronim dari Sistem Informasi Manual Tapi Lancar

JOKO RAHARJO, S.Kom., MM.
NDH-03
PESERTA PKA ANGKATAN VIII
TAHUN 2021

SUSUNAN TIM KERJA AKSI PERUBAHAN

- MENTOR

<u>AGUNG MOELJONO S, S.H., M.H</u>
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

- COACH

<u>Dr. SUKARDO, M.Si</u>
Widyaiswara Ahli Utama

LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi regulasi dari Kementerian Keuangan agar pemerintah daerah (pemda) menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan untuk menangani pandemi *Covid*-19 dan belanja prioritas lainnya, dimana dukungan pendanaan tersebut bisa bersumber dari dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH).

Sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021, perubahan rincian anggaran transfer ke daerah dan pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Oleh sebab itu, pada tanggal 15 Februari 2021 Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*covid*-19) dan Dampaknya.

Sebagaimana diketahui bahwa sesuai PMK No. 17/PMK.07/2021 bunyi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK/07/2021" Paling sedikit 8% dari alokasi DAU. Dalam hal pemda tidak mendapat alokasi DAU, dukungan pendanaan bisa bersumber dari DBH paling sedikit 8% dari alokasi,". Pemerintah Daerah diminta menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19 paling sedikit 8% dari alokasi DAU/DBH. Berkaitan dengan hal tersebut, Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi dukungan pendanaan dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap tanggal 14 untuk periode laporan bulan sebelumnya.

Selanjutnya, untuk lebih mempercepat pelaksanaan penanganan *Covid*-19, juga telah diterbitkan Surat Edaran Dirjen Perimbangan No. SE-6/PK/2021 Tentang Dukungan Pendanaan Daerah Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi *Covid*-19. Dalam rangka monitoring pelaksanaan *earmarking* 8% DAU/DBH untuk dukungan penanganan *Covid*-19, kemeterian keuangan mewajibkan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi secara berkala 2 (dua) kali sebulan (pertengahan dan akhir bulan) mengenai realisasi dan kendala pelaksanaan *earmarking* 8% DAU/DBH yang dihadapi pemda. Adapun rekapitulasi penyampaian laporan dilaksanakan monitoring oleh PIC DAU/DBH Jatim yang disampaikan di *WAG* Forum DAU Jawa Timur pada tanggal 9 Agustus 2021.

Oleh karena hal itu, untuk mendukung percepatan penyampaian laporan pemerintah daerah yang saat ini masih terkendala dalam pengoperasian aplikasi keuangan yang dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri maka sangat diperlukan adanya inovasi atau perubahan dalam menentukan sumber dana pada belanja OPD,

Adapun kendala yang sampai saat ini terjadi, aplikasi keuangan Kemendagri tersebut belum berjalan sempurna, dan masih dalam tahap pengembangan dalam menjalankan/memenuhi fungsi akuntansi dan pelaporan agar mampu mengakomodasi regulasi dari kementerian keuangan. Disamping hal tersebut, aplikasi kemendagri tersebut masih belum mampu mengakomodir pelabelan belanja sesuai kebutuhan OPD maupun pelaporan kepada Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri sendiri.

Untuk menyikapi aturan baru tentang penyaluran DBH/DAU tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah akan memaksimalkan semua sarana prasarana dan sumber daya manusia yang ada, demi melaksanakan regulasi baru tersebut, dengan harapan tidak menerima sangsi penundaan atau pemotongan besaran transfer dana perimbangan perbulan yang tertuang dalam APBN Tahun Anggaran 2021 ini, yang tentunya akan berimbas pada rencana program kerja pemda sendiri.

Dalam upaya melakukan perubahan menuju kondisi ideal, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain adalah pengenalan terhadap masalah dan kekurangan yang sedang terjadi/menjadi beban bagi organisasi tersebut. Dengan mengenali masalah, kemudian dapat menjadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut menuju kondisi yang lebih baik.

Perencanaan yang baik akan menghasilkan perubahan yang baik, itulah keberhasilan yang diharapkan dari perubahan yang akan dilaksanakan.

Sesuai Visi dalam RPJMD 2019-20124 Kota Mojokerto, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto masuk dalam Misi ke VII yang membawa misi :

“Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang Lebih Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat”

Yang mempunyai tujuan :

1) Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah
2) Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah

KONDISI SEBELUM DAN SESUDAH AKSI PERUBAHAN

NO	SEBELUM AKSI PERUBAHAN	SETELAH AKSI PERUBAHAN
1	Data belanja per sumber dana masih belum terbentuk secara teratur, khususnya dalam memenuhi regulasi pelaporan *Covid*-19	Terbentuknya struktur data belanja per sumber dana dari hasil *refocusing* dan pemenuhan pelaporan *Covid*-19
2	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SI-MANTAN dalam menyajikan laporan keuangan secara periodik	Pemanfaatan aplikasi SI-MANTAN dalam menyajikan laporan keuangan secara periodik lebih optimal
3	Sulitnya dalam hal pengawasan da monitoring realisasi belanja	Pengawasan dan monitoring bisa dilaksanakan sewaktu-waktu terhadap belanja yang bersumber dari dana tertentu

PEMETAAN *STAKE HOLDER*

ANALISA *STAKEOLDER*

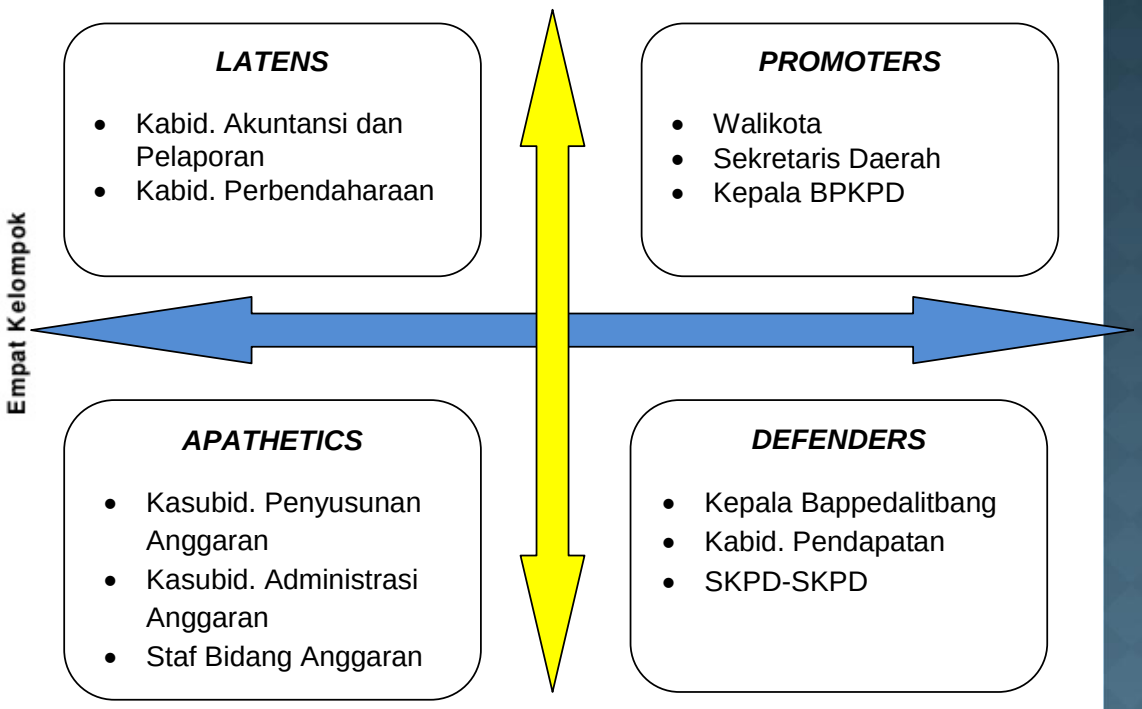

Milestone Aksi Perubahan

Jangka Menengah

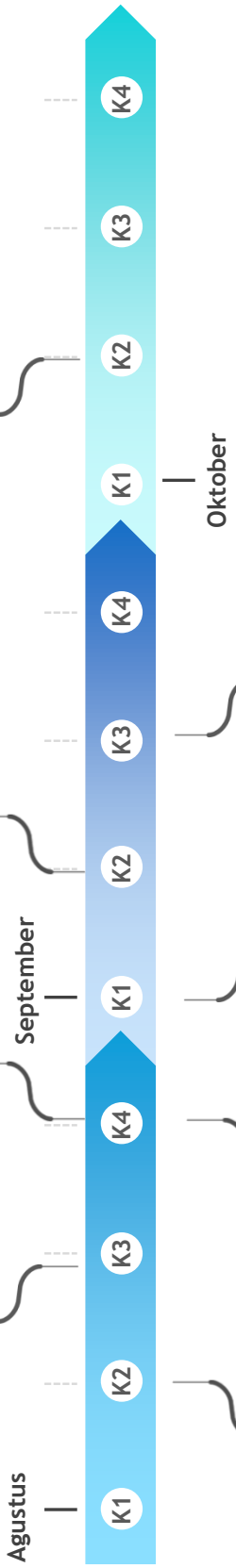

Uji Coba Laporan

Menyusun draf laporan periodik

Analisa *database* hasil migrasi data

06

Menganalisa *database* hasil migrasi data

Mempelajari data awal

04

Mempelajari dan menelaah, sumber dana per belanja opd

02

Rapat Koordinasi Internal Tim Aksi Perubahan

Memperoleh dukungan dari Tim pelaksanaan aksi perubahan

Konsultasi Mentor

01

Konsultasi tentang pelaksanaan aksi perubahan

Menyusun Panduan Migrasi *database*

03

Buku sebagai panduan dalam migrasi data oleh tim TI

Migrasi data anggaran

05

Menyiapkan *database* aplikasi SI-MANTAN

***Mapping* per sumber dana**

07

Melakukan pemutahkiran sumber dana belanja OPD

IMPLEMANTASI AKSI PERUBAHAN

- KONSULTASI BIMBINGAN MENTOR (Minggu ke-2 BulanAgustus 2021)

Disela-sela kesibukan mentor yang merangkap jabatan selaku Kepala Bappeda-Litbang dan Plt . BPKPD Kota Mojokerto, beliau menyempatkan diri untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam aksi perubahan ini.

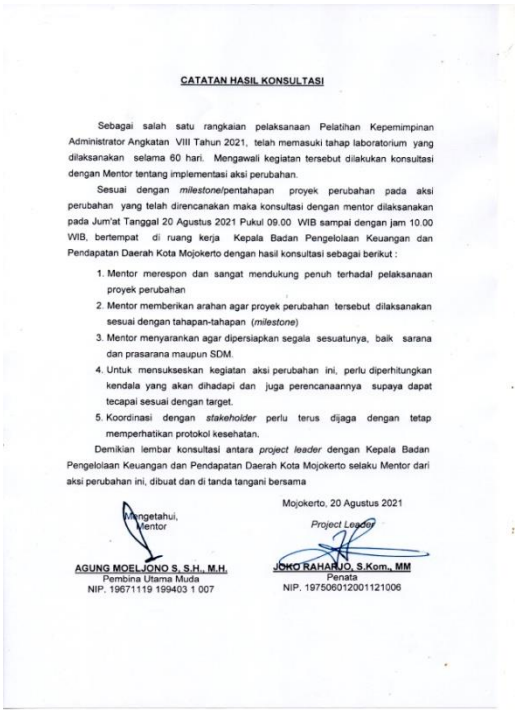

CATATAN HASIL KONSULTASI

Sebagai salah satu rangkaian pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VIII Tahun 2021, telah memasuki tahap laboratorium yang dilaksanakan selama 60 hari. Mengawali kegiatan tersebut dilakukan konsultasi dengan Mentor tentang implementasi aksi perubahan.

Sesuai dengan *milestone*/pentahapan proyek perubahan pada aksi perubahan yang telah direncanakan maka konsultasi dengan mentor dilaksanakan pada Jum'at Tanggal 20 Agustus 2021 Pukul 09.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto dengan hasil konsultasi sebagai berikut :

1. Mentor merespon dan sangat mendukung penuh terhadal pelaksanaan proyek perubahan
2. Mentor memberikan arahan agar proyek perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan (*milestone*)
3. Mentor menyarankan agar dipersiapkan segala sesuatunya, baik sarana dan prasarana maupun SDM.
4. Untuk mensukseskan kegiatan aksi perubahan ini, perlu diperhitungkan kendala yang akan dihadapi dan juga perencanaannya supaya dapat tecapai sesuai dengan target.
5. Koordinasi dengan *stakeholder* perlu terus dijaga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Demikian lembar konsultasi antara *project leader* dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto selaku Mentor dari aksi perubahan ini, dibuat dan di tanda tangani bersama

Mojokerto, 20 Agustus 2021

Mengetahui,
Mentor

AGUNG MOELJONO S, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671119 199403 1 007

Project Leader

JOKO RAHARJO, S.Kom., MM
Penata
NIP. 197506012001121006

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Letkol. Sumarjo No. 62 Telp. (0321) 321753, 395945 Fax. (0321) 321753
MOJOKERTO 61318

SURAT DUKUNGAN MENTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: AGUNG MOELJONO S, S.H., M.H.
NIP	: 19671119 199403 1 007
Pangkat / Gol. Ruang	: Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan	: Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto

Dengan ini memberikan dukungan proyek perubahan kepada :

Nama	: JOKO RAHARJO, S.Kom., MM
NIP	: 197506012001121006
Pangkat / Gol. Ruang	: Penata/IIIc
Jabatan	: Kepala Bidang Anggaran
Peserta Diklatpim	: Angkatan VIII

Atas Aksi Perubahan dengan Judul " ***REUSE* APLIKASI SI-MANTAN SEBAGAI SARANA PELAPORAN DTU PEMDA** ".

Mojokerto, 20 Agustus 2021
Mentor

AGUNG MOELJONO S, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671119 199403 1 007

Implemantasi Aksi Perubahan

- Rapat Koordinasi Internal dan Membentuk Tim Aksi Perubahan

  (Minggu ke-3 Bulan Agustus 2021)

Untuk mensukeskan rencana aksi perubahan maka dibentuk tim pelaksana yang dituangkan dalam keputusan Kepala BPKPD Kota Mojokerto

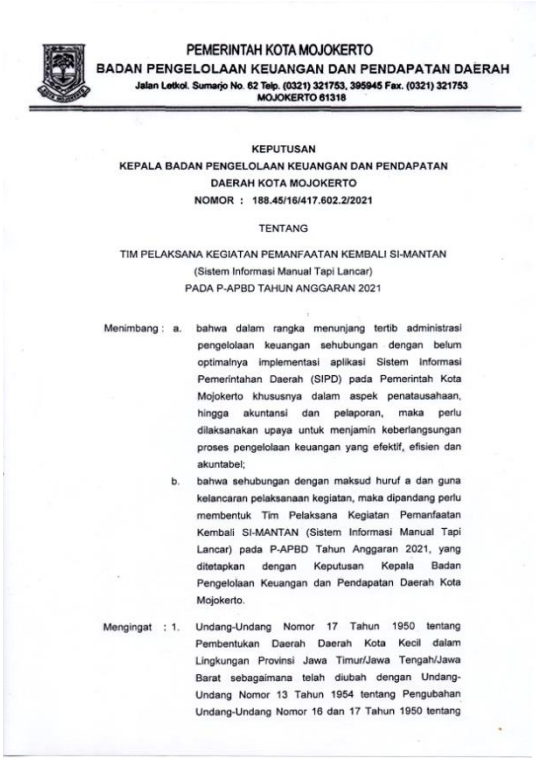

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Letkol. Sumarjo No. 62 Telp. (0321) 321753, 395945 Fax. (0321) 321753
MOJOKERTO 61318

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/16/417.602.2/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANFAATAN KEMBALI SI-MANTAN
(Sistem Informasi Manual Tapi Lancar)
PADA P-APBD TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tertib administrasi pengelolaan keuangan sehubungan dengan belum optimalnya implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kota Mojokerto khususnya dalam aspek penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan, maka perlu dilaksanakan upaya untuk menjamin keberlangsungan proses pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan Kembali SI-MANTAN (Sistem Informasi Manual Tapi Lancar) pada P-APBD Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang

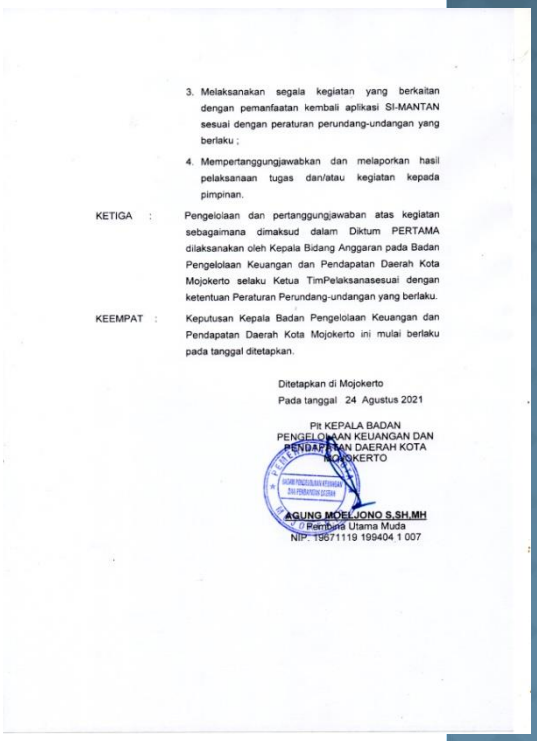

3. Melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan kembali aplikasi SI-MANTAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada pimpinan.

KETIGA : Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto selaku Ketua TimPelaksanasesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 24 Agustus 2021

Plt KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA
MOJOKERTO

AGUNG MOELJONO S.SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19571119 199404 1 007

Implemantasi Aksi Perubahan

- Menyusun Panduan Migrasi *database* aplikasi

  (Minggu ke-4 Bulan Agustus 2021)

Tujuan dari penyusunan Panduan Migrasi database aplikasi ini, sebagai upaya transfer ilmu kepada pemda lain apabila membutuhkan aplikasi SI-MANTAN ini sebagai sarana pengelolaan keuangan

Implemantasi Aksi Perubahan

- Mempelajari data awal anggaran pada aplikasi SI-MANTAN

  (Minggu ke-4 Bulan Agustus 2021)

Menganalisa data awal hasil perubahan anggaran terbaru di aplikasi SI-MANTAN, untuk dianalisa program, kegiatan dan sub kegiatan serta belanja yang akan dimutahkirkan sumber dananya.

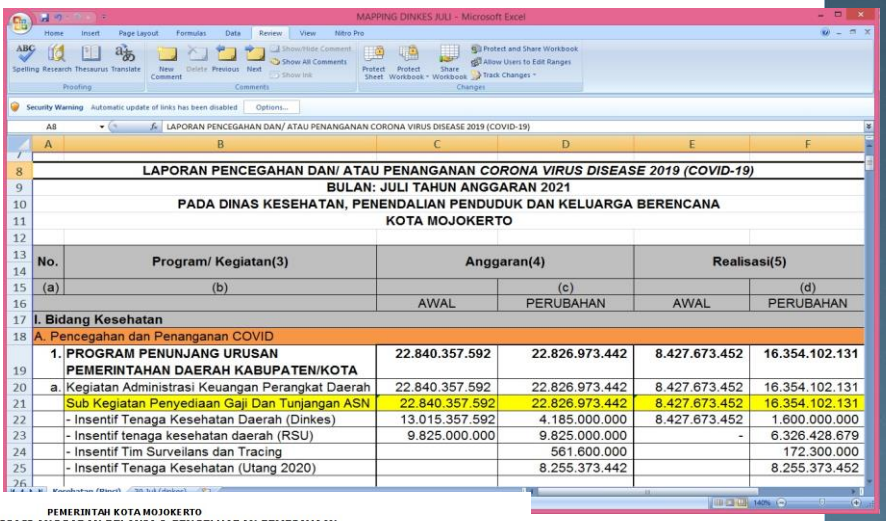

LAPORAN PENCEGAHAN DAN/ ATAU PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
BULAN: JULI TAHUN ANGGARAN 2021
PADA DINAS KESEHATAN, PENENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MOJOKERTO

No.	Program/ Kegiatan(3)	Anggaran(4)		Realisasi(5)	
(a)	(b)	(c)		(d)	
		AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN
I.	Bidang Kesehatan				
A.	Pencegahan dan Penanganan COVID				
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.840.357.592	22.826.973.442	8.427.673.452	16.354.102.131
a.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.840.357.592	22.826.973.442	8.427.673.452	16.354.102.131
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	22.840.357.592	22.826.973.442	8.427.673.452	16.354.102.131
	- Insentif Tenaga Kesehatan Daerah (Dinkes)	13.015.357.592	4.185.000.000	8.427.673.452	1.600.000.000
	- Insentif tenaga kesehatan daerah (RSU)	9.825.000.000	9.825.000.000	-	6.326.428.679
	- Insentif Tim Surveilans dan Tracing		561.600.000		172.300.000
	- Insentif Tenaga Kesehatan (Utang 2020)		8.255.373.442		8.255.373.452

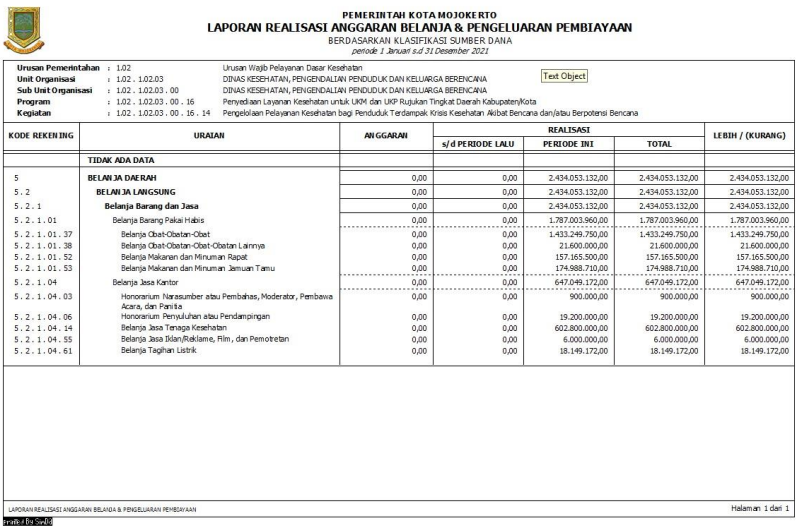

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA & PENGELUARAN PEMBIAYAAN
BERDASARKAN KLASIFIKASI SUMBER DANA
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan	: 1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Unit Organisasi	: 1.02 . 1.02.03	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Text Object
Sub Unit Organisasi	: 1.02 . 1.02.03 . 00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Program	: 1.02 . 1.02.03 . 00 . 16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Kegiatan	: 1.02 . 1.02.03 . 00 . 16 . 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
	TIDAK ADA DATA					
5	BELANJA DAERAH	0,00	0,00	2.434.053.132,00	2.434.053.132,00	2.434.053.132,00
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	0,00	0,00	2.434.053.132,00	2.434.053.132,00	2.434.053.132,00
5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	2.434.053.132,00	2.434.053.132,00	2.434.053.132,00
5 . 2 . 1 . 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	1.787.003.960,00	1.787.003.960,00	1.787.003.960,00
5 . 2 . 1 . 01 . 37	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	1.433.249.750,00	1.433.249.750,00	1.433.249.750,00
5 . 2 . 1 . 01 . 38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	157.165.500,00	157.165.500,00	157.165.500,00
5 . 2 . 1 . 01 . 53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	174.988.710,00	174.988.710,00	174.988.710,00
5 . 2 . 1 . 04	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	647.049.172,00	647.049.172,00	647.049.172,00
5 . 2 . 1 . 04 . 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5 . 2 . 1 . 04 . 06	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
5 . 2 . 1 . 04 . 14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	602.800.000,00	602.800.000,00	602.800.000,00
5 . 2 . 1 . 04 . 55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5 . 2 . 1 . 04 . 61	Belanja Tagihan Listrik	0,00	0,00	18.149.172,00	18.149.172,00	18.149.172,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA & PENGELUARAN PEMBIAYAAN — Halaman 1 dari 1

Implemantasi Aksi Perubahan

- Migrasi data anggaran setelah ditetapkan Perda P-APBD

  (Minggu ke-1 sd ke-2 Bulan September 2021)

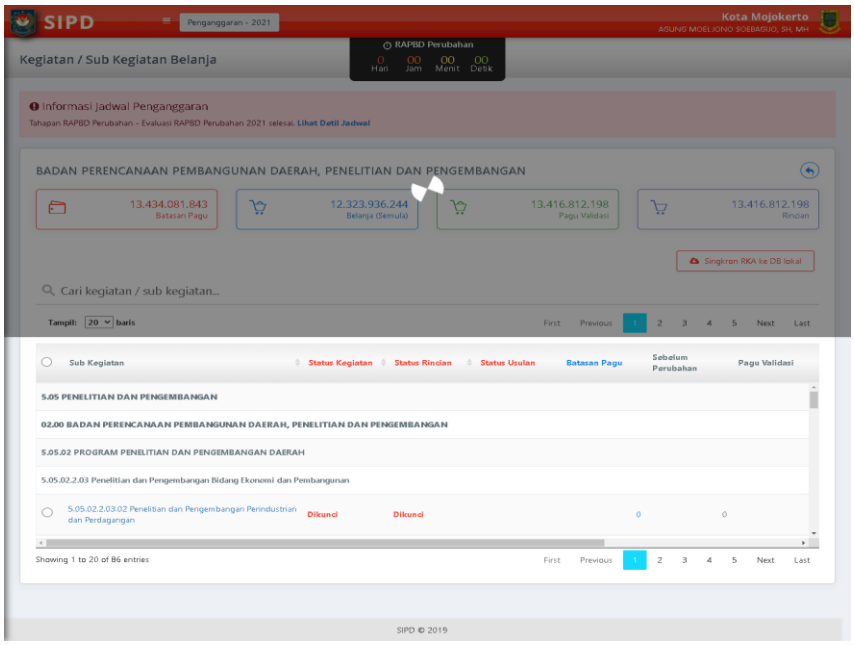

Migrasi data ini, merupakan langkah awal untuk persiapan dalam memanfaatkan aplikasi SI-MANTAN,

Implemantasi Aksi Perubahan

- Analisa *database* hasil migrasi data

  (Minggu ke-2 Bulan September 2021)

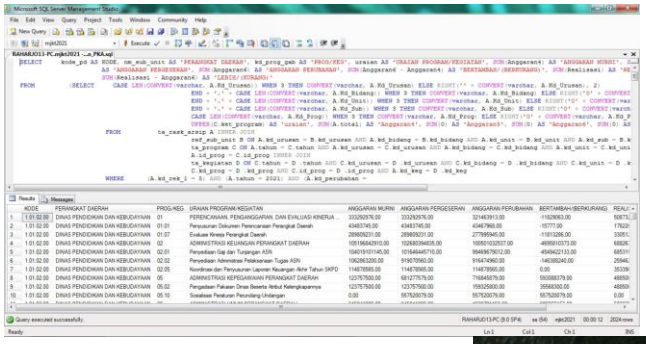

Analisa *database* hasil migrasi data yang menyandingkan priviu laporan antara aplikasi Kemendagri dengan SI-,MANTAN, sebagai bahan melakukan *mapping* per sumber dana

Implemantasi Aksi Perubahan

- *Mapping* per sumber dana pada aplikasi SI-MANTAN

  (Minggu ke-3 September sd ke-1 Bulan Oktober 2021

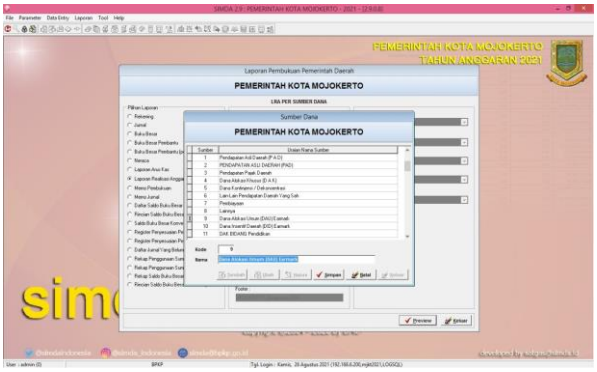

Pada saat melaksanakan pentahapan *mapping* data anggaran, aplikasi SI-MANTAN juga di sediakan tangging anggaran, yang berfungsi untuk melakukan pelabelan belanja, untuk kepentingan pelaporan dana penanganan pandemi *Covid*-19. dengan adanya update aplikasi ini, telah dipersiapkan buku panduan yang akan memberikan tuntunan kepada *user*.

Implemantasi Aksi Perubahan

- Uji Coba Laporan

  (Minggu ke-2 Oktober sd ke-4 Bulan Oktober 2021)

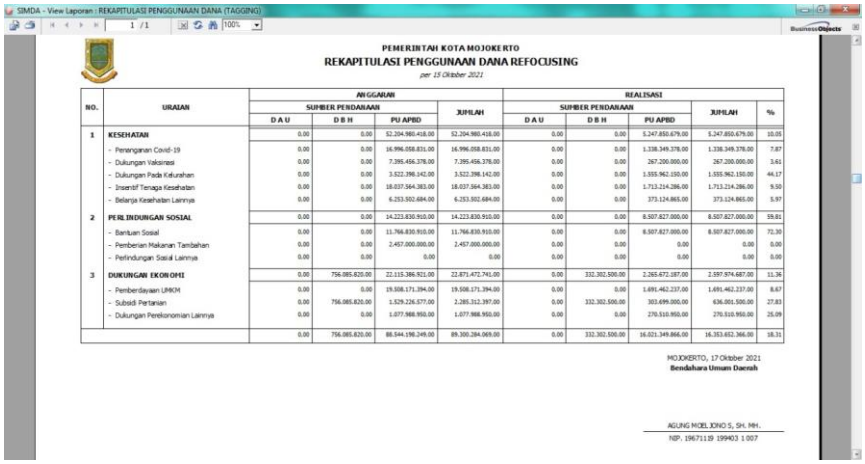

SIMDA - View Laporan : REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA (TAGGING)

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA REFOCUSING

per 15 Oktober 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN				REALISASI				
		SUMBER PENDANAAN			JUMLAH	SUMBER PENDANAAN			JUMLAH	%
		D A U	D B H	PU APBD		D A U	D B H	PU APBD		
1	**KESEHATAN**	0.00	0.00	52.204.980.418.00	52.204.980.418.00	0.00	0.00	5.247.850.679.00	5.247.850.679.00	10.05
	- Penanganan Covid-19	0.00	0.00	16.996.058.831.00	16.996.058.831.00	0.00	0.00	1.338.349.378.00	1.338.349.378.00	7.87
	- Dukungan Vaksinasi	0.00	0.00	7.395.456.378.00	7.395.456.378.00	0.00	0.00	267.200.000.00	267.200.000.00	3.61
	- Dukungan Pada Kelurahan	0.00	0.00	3.522.398.142.00	3.522.398.142.00	0.00	0.00	1.555.962.150.00	1.555.962.150.00	44.17
	- Insentif Tenaga Kesehatan	0.00	0.00	18.037.564.383.00	18.037.564.383.00	0.00	0.00	1.713.214.286.00	1.713.214.286.00	9.50
	- Belanja Kesehatan Lainnya	0.00	0.00	6.253.502.684.00	6.253.502.684.00	0.00	0.00	373.124.865.00	373.124.865.00	5.97
2	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	0.00	0.00	14.223.830.910.00	14.223.830.910.00	0.00	0.00	8.507.827.000.00	8.507.827.000.00	59.81
	- Bantuan Sosial	0.00	0.00	11.766.830.910.00	11.766.830.910.00	0.00	0.00	8.507.827.000.00	8.507.827.000.00	72.30
	- Pemberian Makanan Tambahan	0.00	0.00	2.457.000.000.00	2.457.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Perlindungan Sosial Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**DUKUNGAN EKONOMI**	0.00	756.085.820.00	22.115.386.921.00	22.871.472.741.00	0.00	332.302.500.00	2.265.472.187.00	2.597.974.687.00	11.36
	- Pemberdayaan UMKM	0.00	0.00	19.508.171.394.00	19.508.171.394.00	0.00	0.00	1.691.462.237.00	1.691.462.237.00	8.67
	- Subsidi Pertanian	0.00	756.085.820.00	1.529.226.577.00	2.285.312.397.00	0.00	332.302.500.00	303.699.000.00	636.001.500.00	27.83
	- Dukungan Perekonomian Lainnya	0.00	0.00	1.077.988.950.00	1.077.988.950.00	0.00	0.00	270.510.950.00	270.510.950.00	25.09
		0.00	756.085.820.00	86.544.196.249.00	89.300.284.069.00	0.00	332.302.500.00	16.021.349.866.00	16.353.652.366.00	18.31

MOJOKERTO, 17 Oktober 2021
Bendahara Umum Daerah

AGUNG MOELJONO S, SH. MH.
NIP. 19671119 199403 1 007

Setelah melaksanakan updating label belanja, maka dilaksanakn ujicoba pelaporan, sambil melaksanakn evaluasi terkait data tangging anggaran, dengan harapan, untuk pelaporan berikutnya, data ini sudah dapat dipergunakan

HASIL CAPAIAN AKSI PERUBAHAN

NO	URAIAN KINERJA	BOBOT TARGET (%)	REALISASI (%)	KET. CAPAIAN (%)
1	Mempersiapkan *database template* SI-MANTAN	10	9	90
2	Analisa awal data anggaran	10	10	100
3	Migrasi data anggaran setelah ditetapkan Perda P-APBD	40	40	100
4	Analisa *database* hasil migrasi data	5	5	100
5	Mapping per sumber dana pada aplikasi SI-MANTAN	30	30	100
6	Laporan keuangan bulanan dan tribulanan	5	5	100
	JUMLAH	100	99	

MANFAAT AKSI PERUBAHAN

- **Internal Organisasi :**
  i. Terbentuknya struktur data belanja per sumber dana dari hasil *refocusing* dan pemenuhan pelaporan *Covid*-19;
  ii. Memanfaatkan aplikasi SI-MANTAN dalam menyajikan laporan keuangan secara periodik yang lebih efektif dan efisien.
- **External Organisasi :**
  i. OPD pengampuh dana *earmark* yang dipergunakan untuk penanganan pandemi *Covid*-19 mampu menyajikan informasi dan mengevaluasi penggunaan dananya, sebagai indikator atas keberhasilan kinerja OPD tersebut dalam Penanganan Pandemi *Covid*-19 ;
  ii. Pengawasan dan monitoring bisa dilaksanakan sewaktu-waktu terhadap belanja yang bersumber dari dana tertentu, oleh pengambil kebijakan khususnya dibidang pengelolaan keuangan.

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Penggunaan kembali aplikasi SI-MANTAN (Sistem Informasi Manual Tapi Lancar) sangat mendukung dalam penatausahan keuangan daerah serta akuntansi dan pelaporannya, sehingga pemerintah daerah mampu menyajikan data *realtime* untuk disajikan kepada pemangku kebijakan di Pemerintah Kota Mojokerto ditengah keterbatasan atas kemampuan aplikasi keuangan (dalam tahap pengembangan) yang telah ditetapkan oleh Kemendagri.

REKOMENDASI

i. Pemerintah daerah membutuhkan aplikasi bantu untuk menyampaikan laporan penggunaan dana penanganan pandemi, yang *familiar* dan *user friendly*, agar tidak membebani pemerintah daerah khususnya OPD, ditengah keterbatasan SDM yang menguasai teknologi informasi (komputerisasi).

ii. Perlu diadakan rekonsiliasi antara bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dengan OPD pengampuh pengguna dana *earmark* penanganan pandemi *Covid*-19 secara berkelanjutan agar diperoleh laporan realisasi belanja yang valid.

iii. Badan Pengelolan Keuangan dan Pendapatan Daerah kota Mojokerto, selaku *leading sector* aplikasi ini, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada semua OPD.

WALIKOTA MOJOKERTO
Hj. IKA PUSPITASARI, SE.

“Maju melangkah Ayo berbenah”